

Aktor Pemilu

Pemantau Pemilu

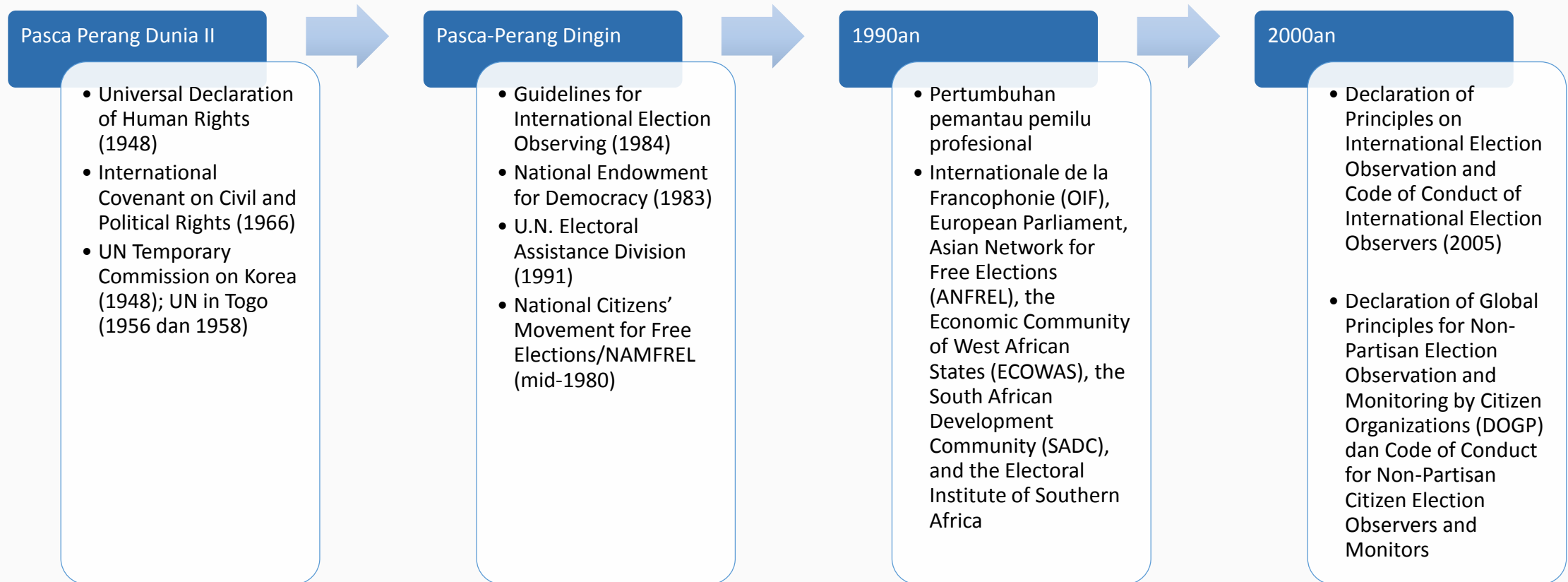
Rabu, 06 Mei 2020, Pukul 11.00-12.30 WIB

Maharddhika, Peneliti Perludem
Nurul Amalia, Peneliti Perludem

Kelas Virtual Perludem



Perkembangan Pemantauan Pemilu



Definisi Pemantauan Pemilu (1)



Pengumpulan informasi mengenai proses pemilu dan penilaian publik terhadap proses tersebut berdasarkan standar universal tentang pemilu demokratis yang dilakukan oleh organisasi yang berkomitmen untuk menjaga netralitas dan proses demokrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dari proses pemilu tersebut. (Bjornlund)



Pengumpulan informasi secara sistematis dan komprehensif mengenai regulasi, proses, dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu selama masa sebelum pemilu, masa tahapan pemilu, dan pasca pemilu. (The Declaration of Principles for International Election Observation)

***Observation* atau *Monitoring*?**

Aspek	Observation	Monitoring
Derajat Keterlibatan	Pasif Mencatat dan melaporkan temuan	Aktif Berupaya mengintervensi atau menindaklanjuti temuan Memberikan rekomendasi
Periode Waktu	Jangka pendek Hanya dalam periode tertentu saja seperti hari pemungutan suara	Jangka panjang Seluruh proses tahapan pemilu, bahkan sebelum dan sesudah pemilu

Definisi Pemantauan Pemilu (2)



Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat: mobilisasi warga negara dengan cara yang netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif secara politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan cara menyaksikan dan melaporkan perkembangan pemilu melalui

- Evaluasi yang independen, sistematis, dan menyeluruh terhadap kerangka hukum, lembaga, dan proses pemilihan umum
- Analisis temuan-temuan secara tidak memihak, akurat, dan tepat waktu
- Penjelasan temuan tersebut dengan tetap menjunjung *code of conduct* ketidakberpihakan dan keakuratan
- Pemberian rekomendasi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis

Tugas Pemantau Pemilu



Mengumpulkan informasi mengenai proses pemilu.










Melaporkan hasil pemantauan kepada publik. Konteks Indonesia, menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu.

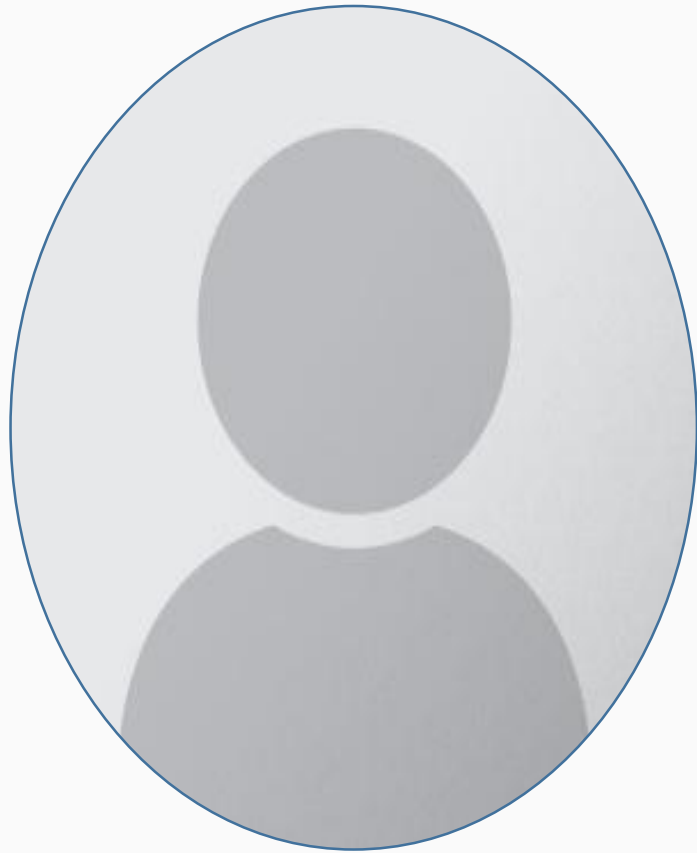


Mempublikasi hasil pemantauan kepada publik.

Kondisi Minimum untuk Efektifitas Pemantauan Pemilu




-  Jaminan Keamanan
-  Transparansi
-  Dukungan Pendanaan
-  Penghormatan terhadap Hak Berpartisipasi
-  Penghormatan terhadap Hak untuk Berkumpul
-  Penghormatan terhadap Hak atas Informasi
-  Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Kode Etik Pemantauan Pemilu



- Menjaga Status Non-Partisan
- Bekerja Independen
- Menjaga Kepatuhan pada Asas Anti Kekerasan
- Menghormati Hukum
- Menghormati Pihak-pihak Terkait Pemilu
- Mendukung Perlindungan Hak Pemilih
- Mendukung Perlindungan Hak Peserta Pemilu
- Menjalinkan Kerja Sama dengan Pemantau Lain
- Membuat Laporan dengan Bertanggung Jawab
- Memfasilitasi Pelatihan yang Berkualitas

Pemantauan Pemilu Berperspektif Gender

-  Pemilu yang demokratis haruslah inklusif. Pemantauan pemilu berperspektif gender dapat membantu mengidentifikasi potensi hambatan yang dialami perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.
-  Hasil pemantauan pemilu berperspektif gender dapat menjadi basis kebijakan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi perempuan di masing-masing tahapan pemilu.
-  Tujuan dari pemantauan pemilu berperspektif gender ialah lahirnya kebijakan-kebijakan berperspektif gender.

Sejarah Pemantauan Pemilu di Indonesia

- ✓ Pemantauan pemilu masa Soeharto : KIPP memantau Pemilu 1997.
- ✓ Pemantauan pemilu masa Reformasi
 - Pemilu 1999
 - Pemilu 2004
 - Pemilu 2009
 - Pemilu 2014
 - Pemilu 2019

Dua Jenis Pemantau Pemilu

Pemantau Lokal/Domestik

- Organisasi masyarakat sipil
- Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah

Pemantau Internasional

- Organisasi internasional
- Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; lembaga pemilihan luar negeri; dan perwakilan negara sahabat di Indonesia

Syarat Menjadi Pemantau Pemilu

- ✓ Bersifat independen
- ✓ Mempunyai sumber dana yang jelas
- ✓ Teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Syarat Khusus bagi Pemantau Pemilu Internasional

- ✓ Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- ✓ Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- ✓ Memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akreditasi Pemantau Pemilu



Memberikan jaminan bahwa lembaga yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu dan status non-partisan atau independensi yang ditetapkan secara terbuka oleh penyelenggara pemilu;



Memberikan jaminan bahwa lembaga yang terakreditasi dapat mengakses proses dan tahapan pemilu tanpa diskriminasi

Syarat Akreditasi Pemantau Pemilu

- ✓ Mendukung pemilu yang demokratis luber jurdil
- ✓ Tidak memihak—terlepas dari kepentingan partai atau kandidat
- ✓ Menyetujui prinsip dan kode etik pemantauan pemilu
- ✓ Mempublikasikan laporan hasil pemantauan yang memuat keabsahan data dan metodologi yang digunakan
- ✓ Mempublikasikan laporan keuangan yang memuat sumber pendanaan

Akreditasi Pemantau Pemilu di Indonesia

Pemilu	Pengaturan
Pemilu 1955	UU No.7/1953 tidak mengatur pemantau dan akreditasi pemantau.
Pemilu di masa Orde Baru	UU No.15/1969 dan UU No.4/1975 tidak mengatur pemantau dan akreditasi pemantau.
Pemilu 1999	UU No.3/1999 Pasal 27 ayat (1): Lembaga pemantau pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan pemantauan mendaftarkan diri pada KPU . Tidak ada aturan soal akreditasi.
Pemilu 2004	UU No.23/2003 Pasal 86 ayat (1) dan UU No.12/2003 Pasal 135: Pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU .
Pemilu 2009	UU No.10/2008 Pasal 151 dan UU No.42/2008 Pasal 174: pemantau pemilu mendaftar dan diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota .
Pemilu 2014	UU No.8/2012 Pasal 152 ayat (6): Pemantau pemilu diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota .
Pemilu 2019	UU No.7/2017 Pasal 351 ayat (6): pemantau pemilu diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota .

Syarat mendapatkan sertifikat akreditasi

Pasal 437 UU No.7/2017: Sertifikat akreditasi pemantau pemilu hanya diberikan kepada pemantau pemilu yang memenuhi persyaratan (mengisi formulir registrasi pemantau pemilu dan mengisi kelengkapan administrasi: profil organisasi/lembaga, Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah atau pemerintah daerah atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, NPWP organisasi atau lembaga, dan nama beserta jumlah anggota pemantau. Bagi pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia, harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri).

Menjaga Independensi Partisipasi Masyarakat

- ✓ Selain pemantauan, ada partisipasi pemilu lain yang juga penting untuk dipastikan memenuhi prinsip independen dan nonpartisan
- ✓ Undang-undang Pemilu Pasal 448 Bab XVII mengatur bentuk partisipasi antara lain:
 - Sosialisasi pemilu
 - Pendidikan politik bagi pemilih
 - Survei atau jajak pendapat tentang pemilu
 - Penghitungan cepat hasil pemilu
- ✓ Prinsip independen dan nonpartisan serta kerangka pengaturan akreditasi kompatibel untuk diterapkan pada bentuk partisipasi ini

Referensi

- ✓ <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2019/01/PANDUAN-PEMANTAUAN-PEMILU-2019-BAGI-PEMANTAU-KOALISI-PEREMPUAN-INDONESIA-FINAL.pdf>
- ✓ <https://tirto.id/sejarah-pemantau-asing-di-indonesia-bermula-pada-pemilu-1999-dkmU>
- ✓ <https://media.neliti.com/media/publications/45224-ID-potret-partisipasi-organisasi-masyarakat-sipil-dalam-pemantauan-pemilu-1999-2014.pdf>
- ✓ https://www.ndi.org/sites/default/files/EXAMPLE_Gender%20and%20Election%20Observation_Burma-English.pdf
- ✓ <http://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge6/developing-a-gender-approach-in-international-and>